



hak asasi manusia dan hiv

Edisi: Nomor 02, Agustus 2010

Kabar Komunitas

Mengupas kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat di empat komunitas yang tengah diberdayakan yakni di komunitas Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), pemakai narkoba, pekerja seks, dan wanita-pria.

- *Ngabuburit* Bersama Komunitas Blora
- Antara Waria dan Pendidikan: Di Balik Pembuatan Film Menyangkal Tangis
- Pentingnya Mengadvokasi Diri Bagi Pemakai Narkoba
- Obrolan Santai Seputar Hukum

Mari Bicara Hukum dan HAM

Tulisan kali ini diambil dari rilis LBH Masyarakat-AHRC/ALRC-dan WISE Project sehubungan dengan kegiatan pelatihan pembuatan film dan penggunaan teknologi internet bagi perempuan untuk advokasi dan pemutaran film yang diselenggarakan pertengahan bulan Agustus 2010.

Suara Komunitas

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat bertanya kepada sepuluh perempuan peserta pelatihan WISE mengenai kemerdekaan Indonesia tahun ini dan harapan mereka khususnya terhadap komunitas mereka. Temukan pandangan mereka di halaman 9, dan coba kita refleksikan sendiri apakah harapan kamu juga sejalan dengan harapan mereka. Jika iya, mari kita wujudkan bersama!

Daftar Isi

Dari Meja Redaksi	1
Kabar Komunitas	2
<i>Ngabuburit</i> Bersama Komunitas Blora	2
Antara Waria dan Pendidikan: Di Balik Pembuatan Film Menyangkal Tangis	3
Pentingnya Mengadvokasi Diri Bagi Pemakai Narkotika	4
Obrolan Santai Seputar Hukum	5
Mari Bicara Hukum dan HAM	7
Suara Komunitas	9
Galeria	10

Yang terhormat pembaca budiman,

Agustus tahun ini menjadi bulan yang penuh makna bagi Indonesia. Tidak hanya karena di bulan ini kita merayakan kemerdekaan kita yang ke-enampuluhlima-tahun, tetapi juga bertepatan dengan datangnya bulan Ramadhan. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tentu kedatangan bulan puasa ini disambut dengan penuh wujud syukur. Selama hari-hari menjelang 17 Agustus, banyak dari kita yang kemudian merefleksikan makna kemerdekaan. Tidak sedikit dari kita yang mengkritisi arti kemerdekaan Indonesia di masa sekarang, mengingat kemiskinan masih ada, dan kekerasan terhadap minoritas masih berlangsung. Singkatnya, pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab Negara (pemerintah) masih terus diabaikan. Tetapi banyak juga dari kita yang mencoba mengisi kemerdekaan dengan optimisme, harapan bahwa hari esok akan lebih baik, dan Indonesia akan menjadi negara yang maju dan bangsa yang beradab yang menghargai perbedaan dan menghormati kemanusiaan, terlepas latar belakangarganya.

HdH edisi kedua datang dengan penuh optimisme karena ternyata di luar dugaan, **HdH** edisi perdana disambut dengan antusiasme tinggi di kalangan komunitas populasi kunci dan insitusi yang relevan. Bahkan versi cetaknya sendiri terus dicari oleh anggota komunitas, dan hingga akhirnya kami harus mengatakan bahwa kami sudah tidak bisa mencetaknya lagi. Sekalipun versi online, tersedia di website LBH Masyarakat, tetapi kami juga menyadari bahwa tidak semua dapat mengakses internet secara mudah. Kepada teman-teman komunitas yang belum sempat membaca versi cetak **HdH** edisi pertama, kami menyampaikan permohonan maaf. Semoga jumlah cetakan edisi kedua ini bisa mencukupi kebutuhan teman-teman akan informasi bertemakan hak asasi manusia dan HIV.

Akhir kata, selamat membaca. Semoga informasi yang kami sajikan dalam **HdH** dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Kritik dan saran senantiasa kami tunggu.

Terima kasih, dan salam hangat

Dari Meja Redaksi

Dewan Redaksi: Ricky Gunawan, Dhoho A. Sastro, Andri G. Wibisana, Ajeng Larasati, Alex Argo Hernowo, Answer C. Styannes, Pebri Rosmalina, Antonius Badar, Feri Sahputra, Grandy Nadeak, Vina Fardhoha, dan Magdalena Blegur
Kuangan dan Sirkulasi: Rizky Halida dan Zaki Wildan

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
 Tebet Timur Dalam III B No. 10, Jakarta 12820
 Telp. 021 830 54 50
 Faks. 021 829 80 67
 Email. contact@lbhmasyarakat.org
 Website. <http://www.lbhmasyarakat.org>

HdH diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) dengan dukungan oleh International Development Law Organization (IDLO) dan OPEF Funds for International Development (OFID).



Kabar Komunitas

Ngabuburit Bersama Komunitas Blora

Hari Sabtu, 14 Agustus 2010 silam, LBH Masyarakat mendapat undangan untuk berbuka puasa bersama para waria yang tinggal di Jalan Blora, daerah Sudirman, Jakarta Pusat. Sama seperti umat Muslim lainnya, para waria yang beragama Islam juga melakukan ibadah puasa dengan serius. Buka puasa yang diselenggarakan oleh Arus Pelangi adalah acara yang selalu diselenggarakan kala bulan Ramadhan datang, dengan tujuan untuk menjalin persahabatan yang lebih erat dengan para waria. Sambil menunggu waktu berbuka, para waria bersama dengan teman-teman dari Arus Pelangi dan LBH Masyarakat tentunya melakukan diskusi kecil dan bincang-bincang santai. Diskusi kali ini membicarakan pengalaman waria ketika berhadapan dengan Satpol PP, Polisi, dan Ormas, terutama di bulan puasa.

Cerita diawali oleh seorang waria senior yang akrab dipanggil Bunda Joyce. Sebagai koordinator yang bertanggungjawab di Taman Lawang (TL), Bunda Joyce sudah sering berurusan dengan Satpol PP, Polisi, maupun Ormas. Menurut pengakuannya, para waria yang ada di TL melalui dirinya telah memiliki hubungan yang baik dengan pihak kepolisian. Jika ada laporan terkait dengan para waria, polisi dengan mudah akan menghubungi Bunda Joyce untuk mendapatkan informasi tentang waria yang bersangkutan. Selain itu, polisi juga sering meminta Bunda Joyce menasehati waria yang nakal.

Walaupun sebagai koordinator, tidak jarang Bunda Joyce menjadi korban salah tangkap. "Satpol PP dan Polisi suka asal angkut aja. Kalau ada waria di pinggir jalan malam-malam pasti dituduh *jualan*, padahal nggak semua waria itu pekerja seks," ujar Bunda Joyce. Dia beberapa kali pernah ditangkap oleh Satpol PP. Ia sudah menjelaskan bahwa dia sedang menjalankan tugasnya untuk memantau TL jika terjadi hal-hal yang buruk yang menimpa para waria dan tamu mereka. Namun pihak polisi dan Satpol PP tidak mau tahu. Bunda Joyce memaklumi karena selama ini dia hanya menjalin komunikasi dengan atasan mereka saja, mungkin saja mereka yang melakukan penangkapan tidak mengenal Bunda Joyce. Ia juga mengeluhkan sikap segelintir waria yang kerap melakukan tindakan tidak pantas seperti bugil di jalanan untuk menarik perhatian pria yang lewat. Akibatnya, semua waria yang tidak melakukan tindakan itu mendapat cap buruk dan teguran dari beberapa pihak.

Hampir semua waria yang angkat bicara dalam diskusi tersebut juga menyesalkan sikap Satpol PP dan Polisi yang kerap kali memeras tamu mereka. Tidak jarang tamu mereka sering mendapatkan pelecehan dari polisi. Beberapa hari yang lalu, tamu dari salah satu waria mendapatkan pelecehan dari pihak kepolisian, sang tamu dipaksa bugil karena tidak mampu membayar uang 'damai' yang diminta oleh polisi.

Hampir semua waria yang angkat bicara dalam diskusi tersebut juga menyesalkan sikap Satpol PP dan Polisi yang kerap kali memeras tamu mereka. Tidak jarang tamu mereka sering mendapatkan pelecehan dari polisi. Beberapa hari yang lalu, tamu dari salah satu waria mendapatkan pelecehan dari pihak kepolisian, sang tamu dipaksa bugil karena tidak mampu membayar uang 'damai' yang diminta oleh polisi. Biasanya polisi meminta tamu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), jika tidak punya, tamu akan dibawa ke suatu tempat. Menurut beberapa pengakuan, tamu yang membawa KTP juga tetap diperas dengan alasan melakukan tindakan asusila. "Polisi biasanya mengancam *pake* pasal-pasal, tamu jadi takut, akhirnya rela bayar. Bayaran ke polisinya bisa berkali-kali lebih mahal dari bayaran saya," ungkap salah satu waria yang tamunya pernah diperas oleh oknum polisi.

Sementara itu pengalaman para waria dengan ormas lebih mengerikan lagi. Salah satu waria pernah hampir dibacok oleh salah satu anggota ormas dengan menggunakan pedang. "Saya hanya bisa jongkok di tanah dan pasrah aja, saya disuruh baca syahadat sama mereka, mereka bilang kalau waria seperti saya tidak pantas hidup," kata Shanti, sambil bergidik mengingat kejadian tersebut.

Seruni, salah seorang waria yang pernah beberapa kali menjuarai kontes Miss Waria bercerita tentang pengalamannya ketika ia menjadi peserta diskusi hukum dan HAM yang dilakukan oleh Komnas HAM di Hotel Bumi Wiyata Depok bulan April lalu. Saat itu, ia dan rekan-rekannya seperti bertaruh nyawa karena salah satu ormas mengusir mereka dari hotel dengan kasar dan disertai kekerasan. Ormas tersebut menuduh bahwa telah diadakan kontes Miss Waria di hotel tersebut, padahal panitia telah menjelaskan bahwa mereka hanya mengadakan workshop dan pelatihan hukum dan HAM.

Diskusi berakhir ketika waktu berbuka tiba. Air muka bahagia terpancar dari wajah mereka. Mereka bersyukur karena masih bisa berpuasa dan berbuka bersama.

Ternyata Tuhan sungguh Maha Adil. Tidak seperti kita, Dia tidak memilih-milih kepada siapa nikmat Ramadhan akan diberi, tanpa terkecuali para waria yang selama ini dicap pendosa oleh sebagian besar masyarakat. (FS).

Antara Waria dan Pendidikan: Di Balik Pembuatan Film Menyangkal Tangis

Pendidikan adalah hal yang mutlak dibutuhkan setiap manusia, karena dengan pendidikan baik formal maupun non-formal, setiap orang akan mendapatkan asupan informasi yang akan meningkatkan kemampuan hidupnya. Dan, hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, menjadi tanggung jawab negara untuk dipenuhi. Pemenuhan hak atas pendidikan pun harus dilakukan tanpa terkecuali. Namun faktanya di lapangan berbicara lain. Hak atas pendidikan seakan hanya menjadi mimpi di siang bolong bagi komunitas waria. Diskriminasi yang dialami oleh waria membuat mereka tidak bisa meneruskan sekolah, padahal tidak sedikit waria yang menginginkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Selain itu waria pun menyimpan banyak potensi yang dapat dikembangkan, sama seperti anggota masyarakat lainnya. Ketika waria sulit mengakses pendidikan formal, pendidikan non-formal seperti pelatihan-pelatihan menjadi pilihan.

LBH Masyarakat bekerjasama dengan Asian Human Rights Commission (AHRC)/Asian Legal Resource Center (ALRC) dan Women's International Shared Experience (WISE) Project mengadakan pelatihan pembuatan film dan penggunaan teknologi internet sebagai alat untuk melakukan advokasi. Pelatihan ini diadakan selama 10 hari sejak tanggal 2 Agustus hingga 13 Agustus 2010, dari jam 10.00 pagi hingga jam 17.00. Pernah, pada satu hari, pelatihan berakhir sekitar jam 21.00 karena materi film yang harus dikejar agar dapat selesai tepat waktu. Agenda pelatihan ini terdiri dari pelatihan secara intensif selama 9 (sembilan) hari dan pemutaran film hasil pelatihan tersebut di hari ke-sepuluh. Film yang dihasilkan diberi judul, Menyangkal Tangis. Awalnya judul film tersebut cukup panjang yakni Menyangkal Tangis: Dari Kemiskinan, Narkotika, Prostitusi, sampai HIV. Mengingat judul tersebut tidak praktis, akhirnya diputuskan untuk diperpendek.

"Biasanya kami itu mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan keterampilan dan kerajinan seperti pelatihan tata rias make up dan rambut, desain pakaian ataupun menari. Jadi pelatihan pembuatan film ini merupakan hal baru bagi kami," ungkap Thalia salah satu waria peserta pelatihan.

Pelatihan ini diberikan kepada 10 (sepuluh) orang perempuan dengan latar belakang mantan pemakai narkotika, pekerja seks, waria, dan perempuan dengan HIV positif. Karena latar belakang yang beragam, awalnya sulit untuk menuangkan ide ke dalam *storyboard* (jalannya cerita) film yang akan mereka buat. Danielle Spencer, fasilitator dan pengajar pelatihan, menghabiskan 2 (dua) hari pertama dengan mengadakan beberapa *games* untuk memungkinkan kesepuluh perempuan tersebut bisa berbagi pengalaman dan menumbuhkan rasa saling percaya dan memiliki.

Pelatihan ini tentunya mendapat kesan tersendiri bagi mereka khususnya bagi para waria. Pelatihan ini merupakan pelatihan yang berbeda dari pelatihan yang biasa diikuti para waria. "Biasanya kami itu mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan keterampilan dan kerajinan seperti pelatihan tata rias *make up* dan rambut, desain pakaian ataupun menari. Jadi pelatihan pembuatan film ini merupakan hal baru bagi kami," ungkap Thalia salah satu waria peserta pelatihan. Meski demikian mereka terlihat sangat antusias dengan pelatihan ini walaupun beberapa hal harus mereka korbankan seperti harus menghabiskan waktu di siang hari yang biasanya mereka manfaatkan untuk beristirahat. Sebagian di antara mereka masih melakukan pekerjaan di malam hari walalupun sebentar. Namun sebagian lagi memilih untuk beristirahat dan hanya sesekali mengunjungi teman-teman yang bekerja untuk membagikan kondom.

Pendidikan non-formal seperti ini sebenarnya merupakan hal yang positif bagi para waria untuk meningkatkan kemampuan diri mereka. Namun sayangnya tidak semua waria antusias mengikuti kegiatan pendidikan non-formal baik seperti pelatihan tata rias atau menari, dan lain sebagainya. Pelatihan yang diikuti waria pada umumnya menuntut konsentrasi dan keseriusan yang penuh dari para waria, sementara tak jarang dari mereka merasa "malas" untuk diajak berpikir. Hal ini tentu bukan kesalahan waria. Diskriminasi yang tinggi dari masyarakat terhadap mereka membuat waria sangat jauh dari urusan pendidikan baik formal maupun non-formal, sehingga tidak terbiasa untuk menjalani kegiatan dalam lingkungan pendidikan yang terkadang mengharuskan mereka untuk mengeluarkan pendapat atau sumbang pikiran. Tidak mengherankan apabila kemudian banyak waria yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Pola dan

gaya hidup yang sehari-hari mereka jalani juga membuat mereka tidak terlalu suka untuk diajak berpikir karena akan menambah beban hidup mereka. Mereka sudah nyaman dengan kondisinya saat ini dan tidak ingin dipusingkan dengan hal-hal yang ‘memusingkan’.

Pada dasarnya para waria, seperti anggota masyarakat lainnya, juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan kemampuan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Kita bisa lihat banyaknya orang yang lebih suka dipotong rambutnya oleh waria daripada oleh laki-laki atau perempuan. Banyak juga yang menyukai hasil desain pakaian dari para waria. Potensi-potensi inilah yang seharusnya dapat dikembangkan dan tidak dikebiri oleh masyarakat dan pemerintah melalui kebijakan yang diskriminatif.

Bagi sebagian besar waria, pelatihan-pelatihan seperti ini memberi banyak hal positif karena dengan pelatihan ini mereka mempunyai keterampilan-keterampilan tambahan yang memungkinkan mereka dapat berkarya dan bukan tidak mungkin menjadi sumber penghasilan yang baru. Karena pekerjaan sebagai pekerja seks yang kini mereka geluti sesungguhnya bukanlah pekerjaan yang mau dan bisa mereka lakukan sepanjang usia mereka. Seperti misalnya Lisa dari Yayasan Srikandi Sejati (YSS) yang gemar untuk mencari ilmu tata rias wajah dan rambut baik dilakukan sendiri atau otodidak atau berguru kepada teman lainnya. “Saya mau punya salon sendiri. Salon ini bisa jadi tempat teman-teman untuk bekerja juga. Jadi bukan cuma saya yang dapat keuntungan, tetapi teman-teman yang lain juga,” ujar Lisa menutup pembicaraan. (VF).

Pentingnya Mengadvokasi Diri Bagi Pemakai Narkotika

Pemerintah Indonesia pada akhir 2009 kemarin telah mengesahkan Undang-Undang Narkotika yang baru, menggantikan UU Nomor 22 tahun 1997. Sama seperti dengan sebelumnya, UU yang baru tetap mengusung semangat perang terhadap narkotika. Tetapi sayangnya semangat tersebut kerap diterjemahkan juga sebagai perang terhadap pemakai narkotika. Padahal menjerakan pemakai narkotika dari kecanduannya tidak dapat menggunakan pendekatan hukum, melainkan pendekatan medis, yakni dengan memulihkan ketergantungannya. Pidanaan terhadap pemakai narkotika juga tidak terbukti berhasil menurunkan angka pemakaian atau penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Berdasarkan data dari Direktur Bina Khusus Narkotika DITJENPAS Muqowimul Aman, Bc.IP, SH dalam seminar “*Hak Atas Kesehatan Bagi Pemakai Narkotika yang Ditahan*” yang diadakan LBH Masyarakat, ICDPR, dan FORKON tahun

Pemerintah Indonesia pada akhir 2009 kemarin telah mengesahkan Undang-Undang Narkotika yang baru, menggantikan UU Nomor 22 tahun 1997. Sama seperti dengan sebelumnya, UU yang baru tetap mengusung semangat perang terhadap narkotika. Tetapi sayangnya semangat tersebut kerap diterjemahkan juga sebagai perang terhadap pemakai narkotika. Padahal menjerakan pemakai narkotika dari kecanduannya tidak dapat menggunakan pendekatan hukum, melainkan pendekatan medis, yakni dengan memulihkan ketergantungannya. Pidanaan terhadap pemakai narkotika juga tidak terbukti berhasil menurunkan angka pemakaian atau penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

lalu, terungkap bahwa ada peningkatan penyalahgunaan narkotika. Hal ini terlihat dari peningkatan tahanan kasus narkotika tiap tahunnya. Dari data yang dimiliki DITJENPAS, tahun 2002 narapidana/tahanan narkotika berjumlah 7.122 orang sedangkan pada tahun 2009 jumlah tahanan mencapai angka 37.295 orang. Dengan demikian harusnya pemerintah memikirkan ulang strateginya untuk menekan angka pemakaian narkotika. Peningkatan yang sangat drastis ini juga seharusnya ditanggapi oleh para komunitas pemakai narkotika secara serius dengan dapat mengadvokasi diri mereka secara efektif. Melakukan advokasi terhadap diri sendiri tentunya dapat dilakukan dengan banyak hal dan tidak harus didampingi seorang yang “expert” seperti pengacara misalnya. Para pemakai sendiri dapat melakukan hal tersebut dengan menjadi orang yang tahu, bukan sok tahu.

“*Saya pernah ditangkap polisi, padahal saat saya ditangkap tidak ada barang bukti. Kemudian saya dibawa ke kantor polisi dan harus membayar sejumlah uang, kemudian dalam 3 hari saya dibebaskan*” kata seorang peserta penyuluhan yang merasa dipermainkan oleh polisi di saat diskusi di salah satu komunitas narkotika. Selain itu saat penyuluhan di Komunitas Metadone Bekasi, banyak dari mereka yang mengeluhkan beberapa teman mereka, bahkan mereka sendiri yang ditangkap, ditahan, dan dijatuhi hukuman yang tidak setimpal. Hal ini terjadi karena mereka kurang dapat mengadvokasi diri mereka sendiri, dan sudah menyerah terlebih dahulu dan memilih mengikuti apa kemauan polisi seperti membayar sejumlah uang dan pasrah disiksa oleh polisi. Begitu juga dalam persidangan kasus narkotika, yang sering kali mendapat perhatian lebih karena proses tersebut merupakan proses penentuan hukuman yang akan didapat oleh seorang terdakwa. Oleh karena itu sudah seharusnya tahapan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan keadilan, dan tidak hanya diam dan pasrah pada hakim yang memimpin persidangan.

Seperti yang terjadi di Pengadilan Negri Depok beberapa waktu yang lalu, seorang pemakai narkoba yang mengadvokasi dirinya sendiri tanpa bantuan pengacara. Sebut saja Hari (bukan nama sebenarnya) merupakan seorang pemakai narkoba yang sedang menjalani pemulihan ketergantungan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur yang diadili atas dugaan sebagai kurir narkoba. Ia didakwa melanggar Pasal 114 UU Narkoba yang mengatur tentang larangan jual beli, dengan dakwaan subsidair Pasal 112 UU Narkoba tentang larangan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pada Hari dengan pidana penjara selama 5 tahun dengan denda sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 2 bulan penjara. Namun atas kejadian yang menimpannya tersebut, ia tidak tinggal diam dan berusaha dengan bantuan dari keluarga dan temannya untuk mengusahakannya masuk rehabilitasi dan tidak dikategorikan sebagai kurir seperti yang dituntut Jaksa Penuntut Umum padanya.

Mulai dari surat yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN), sampai surat keterangan dari RSKO Cibubur, diusahakan olehnya untuk menarik simpati Majelis Hakim agar percaya padanya bahwa dia adalah seorang pemakai narkoba yang mengalami ketergantungan dan harus menjalani rehabilitasi medis. Usahanya tidak hanya sebatas itu saja namun ia mengikuti persidangan dengan bermodal kejujuran dan semangat harapan untuk mendapat rehabilitasi. Dalam persidangan yang berlangsung sekitar akhir bulan Juli kemarin sampai saat ini, Hari menyadari kesalahannya dan semua yang ia lakukan diakui sebagai kesalahannya dalam pemeriksaan di persidangan, namun ia mengatakan pada Majelis Hakim bahwa ia melakukan hal tersebut karena ia merupakan seorang pemakai yang mengalami ketergantungan. Setidaknya itulah yang ia sampaikan dalam pledoi/pembelaannya yang ia sampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang menyidangkannya. Meski demikian usaha tersebut belum terlihat hasilnya karena putusan baru akan dibacakan pada 1 September yang akan datang. Usaha untuk mengadvokasi diri sendiri seperti ini, menjadi pelajaran yang baik karena dengan demikian semakin banyak orang yang dapat mengerti tentang hukum khususnya bagi para pemakai narkoba agar mendapatkan haknya dengan tidak pasrah pada keadaan yang ada. (AB).

Obrolan Santai Seputar Hukum

Pada tanggal 31 Juli 2010 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) diundang oleh Yayasan Pelita Ilmu (YPI) untuk mengisi sebuah acara rutin yang mereka adakan sebulan sekali yaitu Obrolan Santai (Obras), bertempat di kantor YPI di bilangan Asem Baris. LBH Masyarakat diwakili oleh Direktur Program Ricky Gunawan, dan Asisten Manajer Ajeng Larasati dan Alex Argo Hernowo memperkenalkan diri kembali mengenai visi, misi, program kerja dan aktivitas sehari-hari kepada anggota YPI dan komunitas dampingannya. Obras dibuka oleh Prof. Dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD, KHOM selaku Badan Pembina YPI yang memaparkan hasil kunjungannya ke Konferensi AIDS Internasional di Vienna akhir Juli silam.

LBH Masyarakat menegaskan dirinya sebagai sebuah lembaga bantuan hukum yang menyediakan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma, termasuk kepada kelompok rentan yang selama ini terpinggirkan dan sulit mendapatkan akses bantuan hukum yakni kelompok lesbian, gay, biseksual dan transjender (LGBT), orang dengan HIV/AIDS, pekerja seks dan pemakai narkoba. Dalam acara yang berlangsung mulai dari pukul 09.00 hingga kurang lebih pukul 15.00 tersebut Ricky mendorong kepada mereka yang selama ini terlanggar haknya untuk tidak ragu mengakses bantuan hukum yang disediakan LBH Masyarakat, karena layanan diberikan tidak dipungut biaya sepeser pun. "Selain penyediaan bantuan hukum, LBH Masyarakat juga aktif menyelenggarakan pemberdayaan hukum masyarakat. Hal ini dilakukan karena kami melihat adanya potensi pemberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat termasuk kelompok rentan sekalipun untuk berperan aktif dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia," ujar Ricky.

Ricky menambahkan bahwa kelompok rentan tersebut di atas, yang biasa disebut dengan istilah populasi kunci, untuk tidak lagi merasa tertindas ketika mengalami diskriminasi, karena siapapun harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. "LBH Masyarakat siap memfasilitasi setiap potensi masyarakat yang ingin melakukan pemberdayaan khususnya di bidang hukum baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain di lingkungannya," tambahnya.

Sesuai dengan judulnya, acara tersebut berlangsung santai penuh tawa tetapi tetap serius. Di akhir presentasinya, Ricky kemudian mempersilahkan bagi para peserta acara untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, dan kepada mereka yang bertanya atau memberikan komentar mendapatkan sebuah buku terbitan LBH Masyarakat berjudul Jejak Langkah Menciptakan Pengacara Rakyat. "Buku ini ditulis oleh para staf LBH Masyarakat yang aktif melakukan pemberdayaan hukum masyarakat di empat komunitas, yakni komunitas nelayan Kali Adem, Jakarta Utara, komunitas remaja sekolah

“LBH Masyarakat akan membantu populasi kunci untuk mendapatkan pemahaman soal hukum dan HAM serta pengetahuan lainnya yang diperlukan untuk membantu teman-teman menyelesaikan masalah tersebut. Dalam konteks pemberdayaan hukum, LBH Masyarakat juga akan melatih anggota komunitas yang potensial untuk menjadi paralegal agar dapat turut membantu penyelesaian persoalan tersebut dan menjadi jembatan antara komunitas dan kami,” tambah Alex di akhir sesi

alternatif di Depok, komunitas remaja keluarga korban Tragedi Mei 1998 di Jati Selatan, Klender, dan juga komunitas pemakai narkoba di Jakarta dan sekitarnya. Diharapkan dengan membaca buku ini, teman-teman terinspirasi untuk melakukan pemberdayaan hukum,” jelas Ricky mengenai isi buku tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta obras pun tidak jauh dari seputar masalah pembagian waris, perceraian dan hak asuh anak. Sebagai contoh sebut saja Pak Harto, seorang lelaki paruh baya yang mengasuh anak tentangganya yang positif HIV karena anak tersebut ditinggal oleh orang tuanya. Pak Harto ingin mengadopsi anak tersebut dan meminta saran kepada LBH Masyarakat bagaimana prosedur permohonan hak asuh. Alex kemudian memberikan penjelasan langkah-langkah sebelum adopsi itu dapat benar-benar dilakukan. “Pertama, Pak Harto harus dapat

membuktikan bahwa bahwa orang tua anak tersebut telah menelantarkan anaknya. Kedua, orang tua atau paling tidak keluarga dari orang tua memberikan izin secara tertulis kepada Pak Harto untuk mengadopsi anak tersebut mengingat bahwa anak tersebut belum berstatus OT (orang terlantar). Ingat, Pak Harto harus bisa memastikan bahwa keluarga anak tersebut sudah tidak mampu menghidupinya lagi, karena apabila tidak, bapak dapat dituntut oleh keluarga anak atas tindak pidana penculikan,” urai Alex.

Tidak lupa Alex juga menambahkan bahwa dalam setiap kasus hukum, ada baiknya untuk mengedepankan musyawarah mufakat atau mediasi daripada penyelesaian di pengadilan, mengingat penyelesaian masalah melalui mediasi atau di luar pengadilan tidak memakan waktu yang terlalu panjang dan berbiaya ringan, ketimbang melalui jalur pengadilan. Oleh karena itulah masyarakat biasa terutama mereka yang rentan stigma dan diskriminasi diharapkan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi dan harus memahami setiap masalah-masalah secara komprehensif baik itu masalah hukum ataupun masalah lainnya. “LBH Masyarakat akan membantu populasi kunci untuk mendapatkan pemahaman soal hukum dan HAM serta pengetahuan lainnya yang diperlukan untuk membantu teman-teman menyelesaikan masalah tersebut. Dalam konteks pemberdayaan hukum, LBH Masyarakat juga akan melatih anggota komunitas yang potensial untuk menjadi paralegal agar dapat turut membantu penyelesaian persoalan tersebut dan menjadi jembatan antara komunitas dan kami,” tambah Alex di akhir sesi. (AAH).

Mari Bicara Hukum dan HAM

Menyangkal Tangis: Dari Kemiskinan, Narkotika, Prostitusi sampai HIV

Telah menjadi dogma di kalangan pemerhati hak perempuan bahwa budaya patriarki yang kuat akan melahirkan relasi kuasa yang timpang antara lelaki dan perempuan. “Dalam lingkungan yang dihegemoni oleh lelaki, perempuan begitu rentan mendapat perlakuan diskriminatif dan terlanggar haknya. Pemenuhan hak perempuan akhirnya sulit tercapai mengingat lelaki akan mengekang perempuan untuk menjalani fungsi tradisional jendernya yaitu menjadi ibu rumah tangga. Dalam hal seorang perempuan juga membawa identitas lain yang kontroversial di mata mayoritas masyarakat, perempuan tersebut akan mengalami diskriminasi berlapis,” tegas Ricky Gunawan, Direktur Program LBH Masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ricky di acara pemutaran film pendek dokumenter berjudul Menyangkal Tangis: Dari Kemiskinan, Narkotika, Prostitusi, sampai HIV, hari Jumat, 13 Agustus 2010 di Pusat Kebudayaan Italia, Jakarta. Acara tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) bekerjasama dengan Asian Human Rights Commission (AHRC)/Asian Legal Resource Center (ALRC) dan Women’s International Shared (WISE) Project.

Lebih lanjut Ricky mengungkapkan bahwa seorang perempuan pemakai narkotika akan mengalami stigma dan penolakan dari keluarga, sementara lelaki pemakai narkotika akan dimaklumi oleh keluarga sebagai kenakalan khas lelaki. Seorang perempuan pekerja seks akan dipandang manusia rendahan, tidak beragama – menafikan kenyataan bahwa eksistensi mereka tidak terlepas dari lelaki hidung belang pemburu seks. Seorang lelaki yang transjender – memilih jender perempuan sebagai jalan hidup – akan diusir dari keluarga. Seorang perempuan yang transjender – memilih jender lelaki – juga akan mengalami pemaksaan identitas sebagai tetap “perempuan”. Dan, seorang perempuan dengan HIV positif akan mendapat citra sebagai perempuan yang “gemar seks bebas” dan amoral.

Berangkat dari situasi tersebut di ataslah pelatihan pembuatan film sebagai perangkat advokasi bagi perempuan pemakai narkotika, pekerja seks, waria dan perempuan dengan HIV positif diselenggarakan. LBH Masyarakat, AHRC/ALRC dan WISE hendak meletakkan konteks persoalan di atas dalam kerangka advokasi hak asasi manusia dengan menggunakan medium video. WISE sendiri adalah sebuah program yang diinisiasi oleh AHRC/ALRC dan mengambil skala Asia sebagai wilayah kerjanya. WISE telah melakukan pelatihan bagi perempuan tertindas dan hidup dalam kemiskinan di Pakistan. Setelah Indonesia, WISE akan melanjutkan kegiatan ini ke Thailand dan Sri Lanka. “WISE bertujuan untuk memberi pelatihan bagi perempuan untuk produksi video dan penggunaan internet sebagai media komunikasi dan mendorong mereka untuk melanjutkan kegiatan serupa sekalipun program telah usai,” ungkap Danielle Spencer, Koordinator Program WISE.

“Dalam lingkungan yang dihegemoni oleh lelaki, perempuan begitu rentan mendapat perlakuan diskriminatif dan terlanggar haknya. Pemenuhan hak perempuan akhirnya sulit tercapai mengingat lelaki akan mengekang perempuan untuk menjalani fungsi tradisional jendernya yaitu menjadi ibu rumah tangga. Dalam hal seorang perempuan juga membawa identitas lain yang kontroversial di mata mayoritas masyarakat, perempuan tersebut akan mengalami diskriminasi berlapis,” tegas Ricky Gunawan, Direktur Program LBH Masyarakat.

Danielle mengutip survey global Bank Dunia tahun 1999 terhadap 60.000 orang yang berpenghasilan kurang dari satu dollar sehari (kurang lebih sepuluh ribu rupiah). Ketika ditanyakan apa yang dapat memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap hidup mereka, sebagai jawaban nomor satu, bahkan di atas kebutuhan pangan dan tempat tinggal adalah akses untuk menyuarkan aspirasi mereka. “Di titik inilah WISE meletakkan konteksnya untuk membuka celah advokasi bagi mereka yang suaranya tidak pernah terdengar,” tambahnya.

Di Indonesia, sepuluh perempuan yang berasal dari latar belakang mantan pemakai narkotika, pekerja seks, waria dan perempuan dengan HIV positif dikumpulkan untuk mengikuti pelatihan intensif selama 9 (sembilan) hari mulai dari Senin, 2 Agustus 2010 sampai Kamis, 12 Agustus 2010. Kesepuluh

perempuan ini belum pernah menggunakan video-kamera dan perangkat pembuatan film lainnya. Selama pelatihan para perempuan tersebut diminta untuk menyuarkan aspirasi, kepentingan dan pandangan mereka mengenai problematika menjadi seorang perempuan di Indonesia pada umumnya dan Jakarta pada khususnya, dalam medium sebuah film berdasarkan pengalaman dan perspektif mereka, dengan memperhatikan segala persoalan kontekstual sosial, ekonomi dan budaya. Film ini, sederhananya, adalah interpretasi para perempuan tersebut terhadap persoalan yang muncul di hadapan mereka. Film ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadi salah satu perangkat advokasi dan

kampanye hak asasi manusia yang dapat mereka dan komunitas mereka manfaatkan. Film tersebut diberi judul, Menyangkal Tangis: Dari Kemiskinan, Narkotika, Prostitusi, dan HIV.

Jakarta, 13 Agustus 2010

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat)
Asian Human Rights Commission (AHRC)/Asian Legal Resource Center (ALRC)
Women's International Shared (WISE) Project

--

Tentang LBH Masyarakat:

Organisasi non-pemerintah nirlaba yang memfokuskan program kerja utamanya pada: penyediaan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan; pemberdayaan hukum masyarakat di tingkat akar rumput melalui pendidikan hukum dan HAM; advokasi kebijakan; dan kampanye HAM di tingkat nasional dan internasional.

Contact person:

Ricky Gunawan

Direktur Program

rgunawan@lbhmasyarakat.org

Tentang AHRC:

Organisasi non-pemerintah regional yang melakukan pemantauan dan lobi-lobi untuk isu HAM di Asia. AHRC berdiri pada tahun 1984.

Tentang ALRC:

Organisasi non-pemerintah regional yang memegang status konsultasi untuk Sidang Ekonomi dan Sosial PBB. ALRC bertujuan untuk memperkuat dan mendorong langkah positif dalam hal persoalan hukum dan HAM di tingkat nasional di negara-negara Asia.

Tentang WISE:

Sebuah program yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan tertindas dan terpinggirkan agar mampu menyuarakan aspirasi dan pandangan mereka mengenai persoalan yang mereka alami. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan cara memberikan pelatihan pembuatan film dan penggunaan teknologi internet sebagai alat advokasi.

Contact person:

Danielle Spencer

Koordinator Program

danielle.spencer@ahrc.asia

<http://www.wisevoicesthroughvideo.org>

Film tersebut dapat juga dilihat di You Tube dengan link berikut: <http://www.youtube.com/watch?v=iJKS-13BxIE>

--

Tulisan di atas adalah rilis media yang dibuat dalam rangka pemutaran film tersebut di atas (RG).

Suara Komunitas

LBH Masyarakat bertanya: Apa harapan kamu sehubungan dengan Hari Kemerdekaan RI, khususnya bagi komunitas kamu?

Shanty, Komunitas Blora:

“Stop diskriminasi dan stigma! Serta layanan kesehatan yang terjangkau, atau bahkan gratis!”

Merry, Paralegal LBH Masyarakat, dari komunitas pemakai narkoba:

“Pemerintah lebih memperhatikan kaum marginal dan juga adanya layanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi lebih ditingkatkan”

Mella, PTRM RSKO Cibubur:

“Ada dua harapan saya. Pertama, khususnya untuk RSKO Cibubur, harga methadone supaya bisa dimurahkan. Yang sekarang, harganya 3 kali lipat dari harga methadone di Puskesmas. Yang kedua, pengobatannya lebih diperhatikan khususnya dalam biaya dan pelayanan. Terkadang pelayanannya suka dibedakan antara pasien peserta Keluarga Miskin (GAKIN)/ JPS dengan pasien biasa.”

Mellisa, PPK-UI:

“Supaya terpenuhinya layanan Rumah Sakit yang terjamin bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)”

Lisa, Petugas *outreach* Yayasan Srikandi Sejati:

“Aku berharap waria tidak lagi mendapat diskriminasi, serta mendapatkan kesempatan untuk mengisi pembangunan di Indonesia di segala bidang. Waria itu juga pintar-pintar dan berguna lho bagi bangsa ini.”

Thalia, Komunitas Blora:

“Yaa supaya pemerintah dapat memberikan pekerjaan yang layak bagi waria dan disejajarkan dengan masyarakat pada umumnya, jadi tidak ada lagi diskriminasi terhadap waria.”

Vivi, ODHA:

“Harapan aku yang pastinya Jakarta jangan macet lagi, jadinya tidak terlambat hadir kalau ada acara. Perempuan-perempuan Indonesia bisa lebih maju dan bebas mengemukakan pendapatnya, serta sederajat dengan laki-laki.”

Yolla, Petugas Outreach Yayasan Srikandi Sejati:

“Harapanku kita sebagai waria diberayakan dan diberikan tempat untuk bekerja sesuai dengna pendidikannya.”

Emah, Ibu Rumah Tangga:

“Harapan saya agar tidak ada lagi diskriminasi dan pengobatan bisa lebih diperhatikan atau gratis.”

Mira, ODHA:

“Pemerintah harusnya lebih memperhatikan subsidi obat buat ODHA dan menyiapkan tempat rehabilitasi untuk korban napza yang tersangkut hukum.”

Galeria



Suasana penyuluhan di salah satu komunitas LSM *harm reduction*.



Sepuluh peserta pelatihan LBH Masyarakat-AHRC/ALRC-WISE berfoto bersama dengan Danielle Spencer, fasilitator (ujung kiri belakang), Mel Coghlan, relawan fasilitator (ujung kiri depan), dan Reza Fahriadi, penerjemah (keempat dari kanan). Lokasi: kantor LBH Masyarakat.

Tentang LBH Masyarakat

Berangkat dari ide bahwa setiap anggota masyarakat memiliki potensi untuk turut berpartisipasi aktif mewujudkan negara hukum yang demokratis, sekelompok Advokat, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi mendirikan sebuah organisasi masyarakat sipil nirlaba bernama Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat).

Visi LBH Masyarakat adalah terwujudnya partisipasi aktif dan solidaritas masyarakat dalam melakukan pembelaan dan bantuan hukum, penegakan keadilan serta pemenuhan HAM. Sementara misinya adalah mengembangkan potensi hukum yang dimiliki oleh masyarakat untuk secara mandiri dapat melakukan gerakan bantuan hukum serta penyadaran hak-hak warga negara, dari dan untuk masyarakat.

Secara ringkas, visi dan misi LBH Masyarakat diimplementasikan melalui tiga program kerja utama, yakni:

- (1) Pemberdayaan hukum masyarakat melalui pendidikan hukum, penyadaran hak-hak masyarakat, pemberian informasi mengenai hukum dan hak-hak masyarakat serta pelatihan-pelatihan bantuan hukum bagi masyarakat;
- (2) Advokasi kasus dan kebijakan publik;
- (3) Penelitian permasalahan publik dan kampanye hak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun internasional.